MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : EK.2.1/294/M.EKON/11/2022 30 November 2022
Sifat : **Sangat Penting**
Hal : Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

Kepada Yth.
Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
di-
Tempat

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, dengan ini disampaikan:

1. Realisasi inflasi Oktober 2022 sebesar 5,71% (yoy), menurun dibanding bulan September sebesar 5,95% (yoy). Secara bulanan, inflasi Oktober juga tercatat deflasi sebesar -0,11% (mtm). Capaian inflasi Oktober yang masih terkendali merupakan hasil atas upaya *extra effort* yang dilakukan oleh seluruh TPIP-TPID sehingga dampak dari penyesuaian harga BBM lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya.
2. Selain itu dari sisi suplai, program-program yang dijalankan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga terus diintensifkan sehingga inflasi *volatile food* menjadi lebih terkendali. Inflasi *volatile food* pada Oktober tercatat sebesar 7,19% (yoy), menurun dibanding September (9,02% yoy). Sementara secara bulanan kembali tercatat deflasi sebesar -1,62% (mtm).
3. Secara historis, pada Natal dan tahun baru beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, beras, daging dan telur ayam. Sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilisasi harga. Selain itu berdasarkan perkembangan harga saat ini, selain komoditas tersebut, komoditas minyak goreng curah dan olahan kedelai (tahu dan tempe) perlu menjadi perhatian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka menjaga inflasi terutama pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, beberapa hal untuk segera ditindaklanjuti oleh TPIP-TPID Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Memperluas kerjasama antar daerah (KAD) intra kawasan guna mengurangi disparitas harga dan mendistribusikan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan Operasi Pasar atau Bazar Pangan Murah maupun KPSH untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan

berbagai *stakeholders*. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dalam pelaksanaannya.

3. Memanfaatkan *platform* perdagangan digital untuk memperpendek rantai pasok dan mempermudah akses ke konsumen. Termasuk optimalisasi penyelenggaraan angkutan laut perintis dan/atau tol laut.
4. Memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk dan pengolahan hasil pertanian (misal: *cold storage*) di daerah sentra produksi untuk memperpanjang umur simpan maupun daerah konsumen untuk menjaga pasokan antar waktu.
5. Mengalokasikan bantuan/subsidi ongkos angkut melalui anggaran APBD sesuai pengaturan perundangan sebagai dukungan memperlancar distribusi dan menekan harga.
6. Memperluas program tanam pekarangan sebagai program ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
7. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja wajib perlindungan sosial maupun BTT untuk pengendalian inflasi. Selain itu, TPID untuk melakukan pendampingan dalam optimalisasi anggaran 20% dana desa dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
8. Memperkuat komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi pasca penyesuaian harga BBM dan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru dengan:
   a. melakukan pemantauan harga bahan pangan secara intensif.
   b. memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern.
   c. menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan stok maupun menjaga stabilisasi harga

Kedepan dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara TPIP dan TPID maupun upaya extra effort sehingga inflasi dapat ditekan pada level yang sama atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi sehingga kualitas pertumbuhan bisa terjaga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Airlangga Hartarto

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perdagangan
6. Sekretaris Kabinet
7. Kepala Badan Pangan Nasional